

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DESA
BUKIT INTAN MAKMUR KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



**Yuni Bariyah Darojatun
NPM : 177310032**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.”** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Septa Juliana, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah di arahkan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada hingga penulis persembahkan kepada ayahanda H.Giman, Ibunda Hj.Lasiyem dan Adik Fatonah Makrifah Azizah yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Teman- teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan kepada saya.

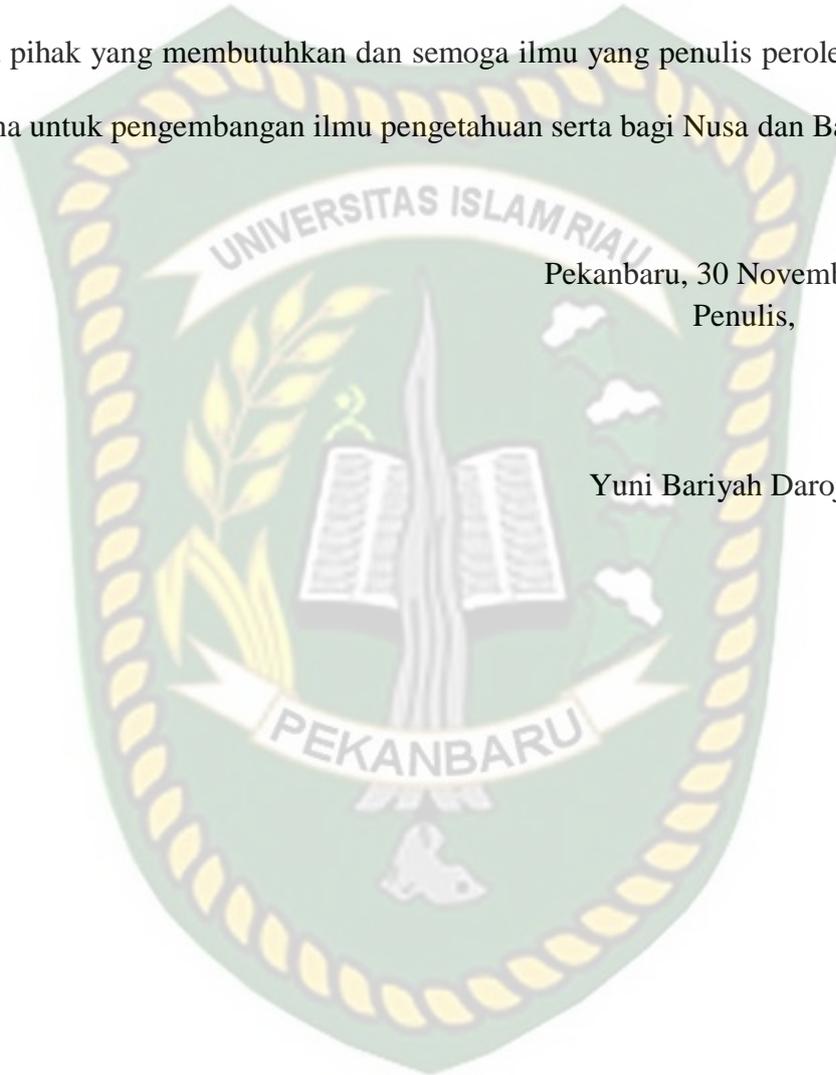
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal,Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Pekanbaru, 30 November 2021

Penulis,

Yuni Bariyah Darojatun



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Administrasi.....	20
3. Konsep Administrasi Pemerintahan.....	22
4. Konsep Organisasi.....	25
5. Konsep Manajemen.....	26
6. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	29
7. Konsep Kebijakan Publik.....	31
8. Konsep Analisis.....	32
9. Program Keluarga Harapan.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Fikir.....	37
D. Konsep Operasional.....	39
E. Operasional Variabel.....	39
BAB III: METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data Dan Tehnik Pengumpulan Data.....	41
1. Sumber Data.....	41
2. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Informan Dan Key Forman.....	43
E. Tehnik Analisis Data.....	44
F. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
A. Sejarah Ringkas Desa Bukit Intan Makmur	48
B. Letak Geografis.....	49
C. Tujuan Pokok Dan Fungsi Program Keluarga Harapan	51
D. Demografis.....	52
E. Sarana Dan Prasarana Desa Bukit Intan Makmur.....	54
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Identitas Responden.....	59
1. Usia Informan	60
2. Jenis Kelamin Informan.....	62
3. Tingkat Pendidikan.....	63
B. Hasil Penelitaian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	64
1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan	66
2. Sumber Daya.....	71
3. Agen Pelaksana.....	76
4. Sikap Para Pelaksana	79
5. Komunikasi	81
6. Lingkungan	83
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	86
BAB VI: PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN	93
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Sebaran Dan Anggaran PKH Tahun 2020	9
I.2 : Jumlah Yang Mendapatkan Program Keluarga Harapan	12
I.3 : Kajian Penelitian Terdahulu.....	36
II.I : Konsep Operasional Pelaksanaan Program Keluarga Harpan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur	39
III.I : Data Informan	44
III.II : Jadwal Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darrussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	46
IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	52
IV.2 : Pemeluk Agama Yang Ada Di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	52
IV.3 : Suku Yang Ada Di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	53
IV.4 : Sarana Dan Prasarana Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	54
IV.5 : Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	55
IV.6 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	56
V.I : Identitas Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	59
V.II : Usia Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	60
V.III : Jenis Kelamin Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	61

- V.IV : Tingkat Pendidikan Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 63



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

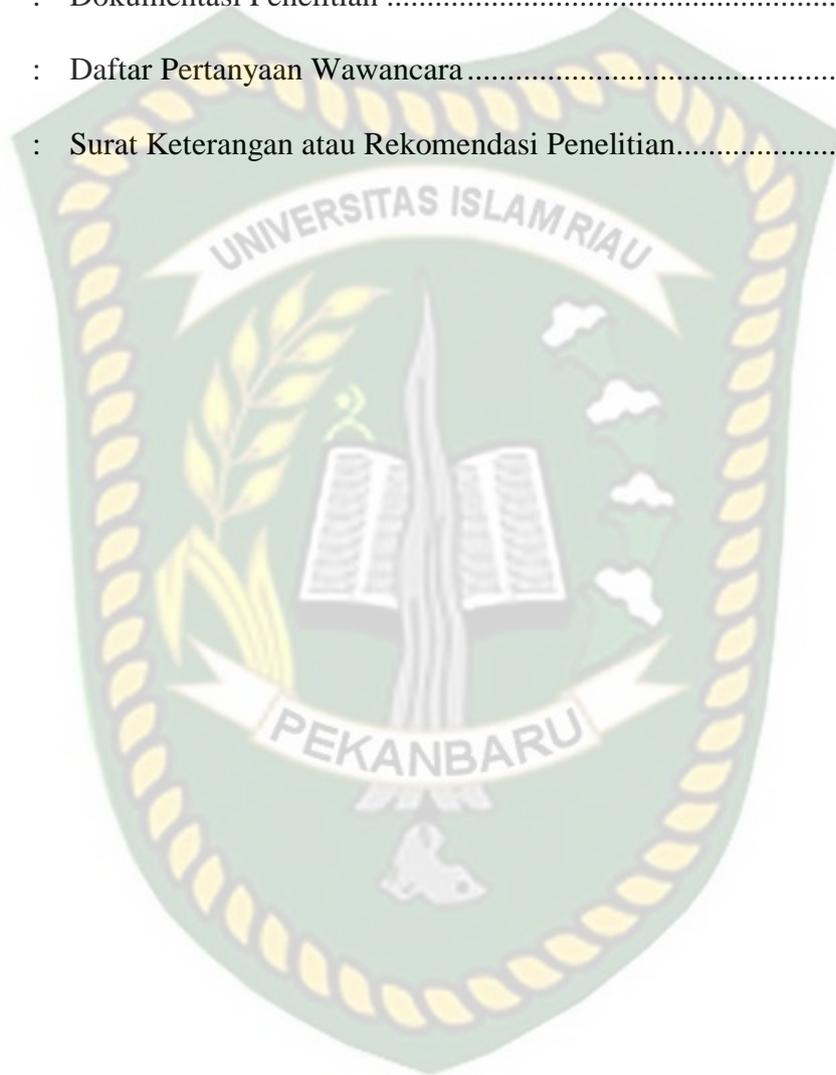
DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara Non Tunai Di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	11
I.2	: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	38
I.3	: Peta Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Dokumentasi Penelitian	98
2 : Daftar Pertanyaan Wawancara	103
3 : Surat Keterangan atau Rekomendasi Penelitian.....	108



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Bariyah Darojatun
 NPM : 177310032
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2021
 Pelaku Pernyataan,

Yuni Bariyah Darojatun

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA
BUKIT INTAN MAKMUR KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

YUNI BARIYAH DAROJATUN

Permasalahan yang sampai kini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah Kemiskinan. Sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia sudah di hadapkan dengan permasalahan ini dan sampai sekarang tetap menjadi masalah utama bangsa Indonesia. masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan faktor- faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian ini Deskriptif Kualitatif, Adapun indikator penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, agen pelaksana, sikap para pelaksana komunikasi dan lingkungan. Adapun hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini bahwa Program keluarga Harapan (PKH) ini dapat membantu ekonomi masyarakat miskin yang ada di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini masyarakat yang telah mampu secara finansial dapat keluar secara mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat yang belum mendapat kan bantuan dan lebih layak untuk menerima bantuan tersebut.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Pelaksanaan Program

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION THE HARAPAN FAMILY
PROGRAM (PKH) IN BUKIT INTAN MAKMUR VILLAGE, KUNTO
DARUSSALAM DISTRICT ROKAN HULU REGENCY**

ABSTRACT

YUNI BARIYAH DAROJATUN

The problem that has been faced by the Indonesian people is poverty. Since the time of independence, the Indonesian people have been faced with this problem and until now it remains the main problem of the Indonesian nation. The problem of poverty is very complex and multidimensional, because it relates to social, economic, cultural and other aspects. The purpose of this study was to find out about the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bukit Intan Makmur Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency and the inhibiting factors for the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bukit Intan Makmur Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. This research method is descriptive qualitative, the indicators of this research are the size and objectives of the policy, resources, implementing agents, the attitude of the implementers of communication and the environment. The results of this study indicate that the implementation of the family of hope program in Bukit Intan Makmur Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency has been carried out in accordance with the regulations and provisions set by the government. Based on the conclusion of this study, the Family Hope Program (PKH) can help the economy of the poor in Bukit Intan Makmur Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The things that need to be improved in the implementation of the Family Hope Program (PKH) are people who are financially able to come out independently from the Family Hope Program (PKH) so that people who have not received assistance are more eligible to receive the assistance.

Keywords: Harapan Family Program, Poverty Implementation Program

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Budiardjo (2008;17). Didalam suatu Negara tentu memiliki bagian-bagian sebagai pelaksanaan tugas dan sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti pendapat dari atmosudiro (dalam Hasibuan, 2006:121) organisai adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok prang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama sama mencapai suatu tujuan tertentu, sebagai mana Negara Indonesia dibentuk ialah untuk mencapai tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat dalam organisasi-organisasi publik sebagai pelaksana tugas-tugas tertentu.

Permasalahan yang sampai kini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah Kemiskinan. Sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan permasalahan ini dan sampai sekarang tetap menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomu, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan merupakan masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah negara.

Mengacu pada penganggulan kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004 kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kemiskinan tidak hanya sebatas kemampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan sebagai seorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi kebutuhan pangan, lingkungan hidup, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah, kemudian faktor selanjutnya kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah kemudian faktor yang terakhir adalah kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain,

seperti pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.

Berbagai kebijakan pemerintah yang menanggulangi kemiskinan diindonesia pada akhirnya diarahkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin, salah satunya yaitu melalui perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kegiatan perlindungan sosial yang telah dilakukan yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menurut Supriyanto: 2014 merupakan salah satu program pemberdayaan Sosial yang dilakukan melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif serta usaha kesejahteraan sosial. KUBE memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan daya masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar, kemudian bentuk peningkatan kesejahteraan lainnya adalah Program Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin) merupakan salah satu program bantuan sosial nasional yang berbasis keluarga. Program ini merupakan kelanjutan dari program Operasi Pasar Khusus (OPK)

pada masa krisis ekonomi 1997-1998, dan memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan dalam program Raskin berupa subsidi bahan pangan pokok, yakni beras. Pemilihan beras bersubsidi sebagai jenis bantuan dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, dan dengan hal tersebut diharapkan beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok dapat berkurang. Program ini juga diharapkan dapat membantu kelompok miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan nutrisi karbohidrat yang cukup. Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat membeli beras Raskin dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Kemudian terdapat juga program kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu kelompok sasaran dari program pemberdayaan sosial di Indonesia. Program pemberdayaan KAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan KAT secara bertahap sehingga mereka memperoleh penghidupan dan kesempatan seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan program pemberdayaan KAT melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah daerah. Program bantuan pemberdayaan yang diberikan meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial, pemberdayaan kelembagaan, serta perlindungan dan advokasi. Salah satu program yang telah terlaksana dengan baik di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia dilandasi dengan Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Lahirnya program keluarga harapan di Indonesia dilatar belakangi oleh keterbatasan keluarga sangat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kenyataan ini terlihat dari angka kematian bayi pada kelompok penduduk berpendapatan rendah, angka kematian ibu di Indonesia juga sangat tinggi. Penyebab tinggi nya angka kematian ibu antara lain adalah tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga tradisional dari pada tenaga medis lainnya. Dengan demikian juga dengan angka kematian belita pada kelompok penduduk berpendapatan rendah, bertambahnya kasus gizi. Tidak kemampuan masyarakat miskin dalam membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan serta beban biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Pada awalnya, PKH dibawah menkokesra,tetapi mulai tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil presiden (Sekpres). PKH di dasari pada peraturan Presiden (PERPRES) NO.15 Tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan instruksi presiden (Impres) No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Peraturan Presiden (Perpres) NO 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan (1) mengurangi pengeluaran masyarakat miskin,(2) meningkatkan kemampuan dan dan pendapatan secara mikro dan kecil. (3) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan. Sedangkan keluarga miskin terdiri dari kelompok berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dan program-program lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dari masalah-masalah diatas maka penulis akan meneliti Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan suatu program dari Pemerintah untuk mengentas kemiskinan yang ada di Indonesia dan memberikan bantuan tunai kepada kepala rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai upaya perlindungan sosial. Program ini mencakup di bidang kegiatan yaitu pendidikan anak usia dini dan anak sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki persyaratan-persyaratan antara lain RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-5 tahun dan berada di Desa Bukit Intan Makmu Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan milineum.

Program perlindungan sosial ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kenyataan lain yang juga melatar belakangi peluncuran Program Keluarga Harapan yaitu keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan pendidikan. Sebagaimana dari anak anak keluarga sangat miskin ada yang sama ada yang sama sekali tidak dapat menyambung bangku sekolah karna keterbatasan biaya dan harus mencari nafkah. Selain itu, meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/MTS. Kondisi ini membuat generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Alasan rumah tangga sangat miskin untuk melanjutkan sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup dan alasan lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat miskin. Bantuan uang tunai berikut akan dicairkan dalam 3 bulan sekali. Dalam setahun masyarakat berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini selama 4 kali dalam setahun. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan dan pendidikan. PKH akan memberikan bantuan kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga.

Menurut data badan pusat statistik provinsi riau pada tahun 2020 kemiskinan di provinsi riau menurun dari tahun 2015 dengan jumlah kemiskinan dipedasaan sebesar 364,94 menjadi 314,79 pada tahun 2019, penurunan tingkat

kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh fungsi kepala desa sebagai pembuat keputusan dimana kepala desa merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari PKH itu sendiri.

Tabel I.I Sebaran dan Anggaran PKH Tahun 2020.

NO	Keterangan	KPM	Bantuan
1	Pusat	10.000.000	7.575.357.175.000
2	Provinsi Riau	157.698	128.865.925.000
3	Kabupaten Rokan Hulu	12.731	10.577.025.000

Berdasarkan data diatas jumlah sebaran dan anggaran PKH tahun 2020 untuk Pusat sebanyak 10.000.000 KPM dengan keseluruhan bantuan senilai 7.575.357.175.000. Untuk Provinsi Riau jumlah bantuan senilai 128.865.925.000 dengan jumlah KPM sebanyak 157.689 KPM. Dan untuk Kabupaten Rokan Hulu sendiri memiliki jumlah KPM sebanyak 12.731 dengan total bantuan senilai 10.577.025.000.

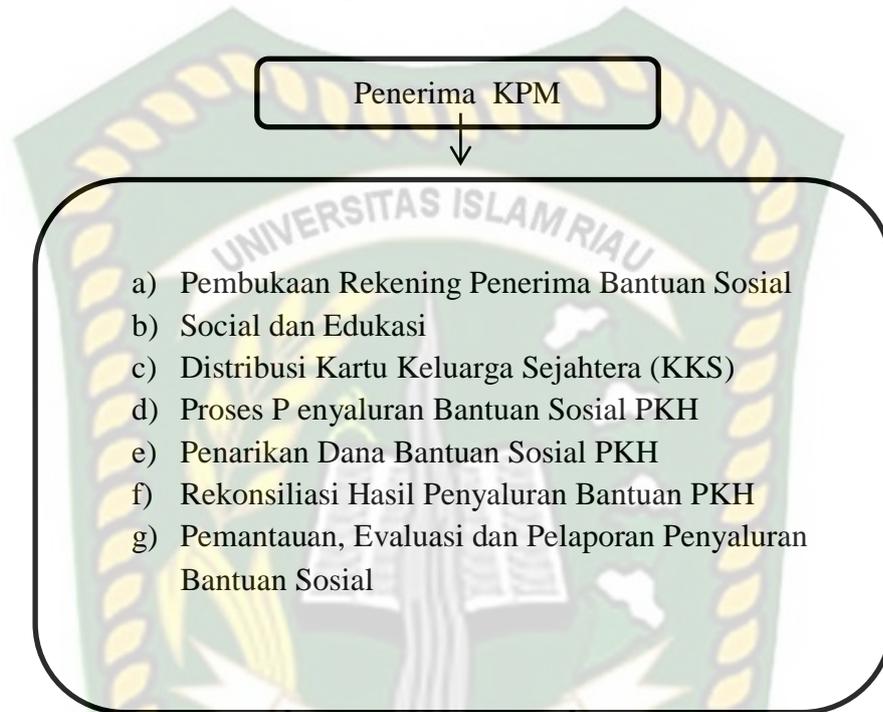
Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada ayat 3 disebutkan, fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepala desa memiliki fungsi untuk mendata masyarakat desanya yang berhak untuk mendapat bantuan data dari masyarakat yang berhak mendapat bantuan tersebut disebut juga dengan basis data terpadu (BDT). Fungsi dari BDT yang didata oleh pihak desa adalah untuk menghindari terjadinya ketidak tepat sasaran penerimaan bantuan PKH dan menghindari ketidak merataan masyarakat medapatkan bantuan. Adapun persyaratan masyarakat yang dapat menerima bantuan PKH ditepkan melalui kreteria RTSM oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian dengan adanya komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar, baik pertahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga, Seluruh anggota rumah tangga yang menjadi penerima bantuan PKH diharuskan menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH, kewajiban bidang kesehatan ialah bagi peserta yang memiliki ibu hamil/nifas dan anak balita umur 5-7 tahun kemudian dalam bidang pendidikan memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan mendaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar.

Gambar I.I Alur mekanisme penyaluran bantuan social PKH secara non tunai di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : PKH Bukit Intan Makmur

Melihat bahwa program merupakan suatu keputusan atau alternative yang dibuat oleh seorang pemimpin dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang disebut dengan kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik menurut James Anderson (dalam Agustino, 2008:7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan. Desa Bukit Intan Makmur adalah salah satu desa yang menerima bantuan PKH dari pemerintah, Desa Bukit Intan Makmur menerima bantuan PKH dengan rincian berikut:

Tabel I.2 Jumlah yang mendapatkan Program Keluarga Harapan.

Tahun	Kategori penerima	Nominal	Jumlah penerima
2018	Ibu Hamil atau nifas	Rp.500.000,.	10
	Anak Usia Dini	Rp.500.000,.	15
	Anak Usia Sekolah SD	Rp.500.000,.	12
	Anak Usia Sekolah SMP	Rp.500.000,.	7
	Anak Usia Sekolah SMA	Rp.500.000,.	7
	Lanjut Usia	Rp. -	-
	Penyanggah Desabilitas	Rp.-	-
	Jumlah	Rp. 2.500.000	51
	2020	Ibu Hamil atau nifas	Rp.975.000
Anak Usia Dini		Rp.750.000	26
Anak Usia Sekolah SD		Rp.975.000	20
Anak Usia Sekolah SMP		Rp.1.250.000	23
Anak Usia Sekolah SMA		Rp.1.125.000	14
Lanjut Usia		Rp.-	-
Penyanggah Desabilitas		Rp.-	-
Jumlah		Rp. 15.075.000	94
2021	Ibu Hamil atau nifas	Rp.975000	9
	Anak Usia Dini	Rp.750.00	15
	Anak Usia Sekolah SD	Rp.975.000	20
	Anak Usia Sekolah SMP	Rp.1.250.00	18
	Anak Usia Sekolah SMA	Rp.1.125.000	15

	SMA		
	Penyangang Desabilitas	Rp. -	-
	Lanjut Usia	Rp. -	-
	Jumlah	Rp.15.075.000	77

Sumber: pengurus PKH Desa Bukit Intan Makmur 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penerima PKH pada tahun 2018 penerima mendapatkan bantuan rata-rata Rp.500.000 dan di tahun 2020 penerima mendapatkan Rp.975.000. Ditahun 2018 yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 51 orang belum memiliki komponen sehingga semua yang mendapatkan bantuan tersebut semua sama rata. Di tahun 2020 ada 94 orang diantaranya 26 orang yang mendapatkan bantuan rata-rata memiliki 1 anak paud dan 1 anak SMP,sehingga bantuan yang di berikan sebesar 1.250.000 per keluarga. Dan di tahun 2021 ada 77 orang yang mendapatkan bantuan tunai,di tahun 2021 ini kebijakannya sudah berbeda dengan kebijakan sebelumnya namun nominal yang didapatkan tetap sama dengan 2020.

Menurut keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan sosial NO 03/3/b3.02.02/12/2020 tentang keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan sosial yang mendapatkan PKH peraturan diatas dijelaskan bahwa besaran bantuan yang akan disalurkan pada masyarakat berbeda setiap penerima ditetapkan berdasarkan peraturan ini. Berikut merupakan besaran yang mendapatkan dan syarat penerima Program Keluarga Harapan:

1. Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan ke 2 (dua) di dalam keluarga PKH.

2. Anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dalam keluarga PKH
3. Anak usia sekolah SD/ Sederajat sebanyak-banyaknya 1 (satu) anak dalam keluarga PKH.
4. Anak usia sekolah SMP/Sederajat sebanyak-banyaknya 1(satu) anak di dalam keluarga PKH.
5. Anak usia sekolah SMA/Sederajat sebanyak-banyaknya 1 (satu) anak didalam keluarga PKH
6. Lanjut usia dengan usia ≥ 70 (tujuh puluh) tahun sebanyak-banyaknya 1(satu) didalam keluarga PKH
7. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang didalam keluarga PKH.

Maksud dari analisis Program Keluarga Harapan pada Kabupaten Rokan Hulu untuk mencapai efektivitas dan efesiensi pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dilapangan yang dapat dilihat sebagai fenomena meliputi:

1. Kurangnya kesadaran penerima bantuan PKH untuk menggunakan bantuan sesuai aturan yang telah di berikan oleh pendamping PKH.
2. Kurangnya komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sosial kabupaten Rokan Hulu dan pendamping PKH kepada masyarakat di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang mana masih ada keluarga yang kurang faham atau belum mengetahui tentang adanya program PKH ini.

Dari fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**

2. Rumusan Masalah

Dalam suatu sistem administrasi Negara Pemerintah merupakan salah satu sub bagian dari system tersebut yang mana pemerintah mempunyai fungsi pengaturan yaitu pemantau suatu kebijakan public yang mana dalam penyelesaian permasalahan yang terdapat pada masyarakat atau publik. Khusus nya pada masalah kemiskinan pemerintah mebuat suatu program yang mana dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang mana bantuan ini untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan keluarga yang di sebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka rumusan masalah utama yang akan muncul pada penelitian **“Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?”**

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Program Keluarga Harapan pada Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

2. Adapun kegunaan penelitian

- a. Sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya disiplin ilmu pemerintahan yang berfokus pada pelaksanaan program pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan program keluarga harapan, khususnya di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

1. Studi Kepustakaan

Untuk melihat bagaimana menilai forma empiris yang akan ditemui akan di susun beberapa konsep yang akan membantu penulis dalam melakukan penelitian, dalam hal ini studi kepustakaan merupakan telaah dari teori teori dan pendekatan yang akan menjadi ukuran dari penilaian pelaksanaan program, maka studi kepustakaan akan dibahas secara satu per satu yang dapat dilihat dibawah ini :

A. Konsep pemerintahan

Pada awalnya pemerintahan dibentuk untuk menghindari terjadinya kekacauan oleh kepentingan individu yang saling berhadapan dalam ruang dan waktu tertentu. Keadaan ini memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok dari gangguan pihak lain. Dalam perkembangannya mereka memperoleh hak istimewa untuk melakukan apa saja dalam kerangka menjamin terpenuhinya perlindungan dan keselamatan. Kelompok tersebut adalah minoritas yang memiliki otoritas relative tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka dengan sadar mengklaim sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah ,sehingga berkenan disebut pemerintah. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara

kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal.

Weber menyimpulkan bahwa pemerintahan tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu (dalam Labodo 2017:28)

Labodo (2017:1) Pemerintahan diartikan sebagai pelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah. Dengan kata lain, pemerintahan hanyalah perkataan konkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari secara seksama dalam kacamata ilmu politik.

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintahan, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus, setelah ditambah akhiran”an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut C.F. Strong (dalam Syafie, 2015: 10) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam

penyelenggaraan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Menurut David Apter (dalam Syafiie,2015:11) Pemerintahan adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya itu adalah bagian monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Ndraaha (dalam Syafiie,2015:11) Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingg dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

B. Konsep administrasi

Mengacu kepada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung di manfaatkannya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan dan tujuan lainnya.

Menurut Leonard D. White (dalam Zulkifli dan Moris,2014:11) dalam bukunya “Introduction to the Study Public Administration” menemukan bahwa “Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale”. Pendapat ini menerangkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai yang dikehendaknya.

Menurut Sondang.P.Siagian (2004:2) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Leonard D. White (dalam Zulkifli. 2014:11) menyatakan administrasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam macam kepentingan sesuai yang dikehendakinya. Selanjutnya menurut Siagian (dalam Nawawi 1994;29) menyatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari penjelasan mengenai administrasi diatas dapat dilihat pada prinsipnya administrasi mempunyai pengertian yang sama yaitu:

- a. Kerja sama
- b. Banyak orang dan
- c. Untuk mencapai tujuan bersama.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pembagian tugas-tugas dan consensus serta dilakukan dengan rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang tersebut. Administrasi adalah sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. masyarakat modern sebagaian kegiatan-kegiatan

para masyarakatnya dilangsungkan dalam prganisasi modern. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat hubungannya dengan organisasi.

C. Konsep Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sedangkan fungsi pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan atau disebut juga fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan.

Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- b. Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Pengaturan administrasi pemerintahan tersebut mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan,

keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan berdasarkan :

1. Asas legalitas, maksudnya bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
2. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, maksudnya bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Pfifner dan Presthus (dalam syafie 2003:31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah,

pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie 2003:33) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J.Gordon (dalam Syafiei 2003:33) bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan

Menurut Edward H. Lichfield (dalam Syafiie 2003:33) bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

D. Konsep Organisasi

Organisasi adalah tempat atau wadah berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Zulkifli (2005;26), Organisasi serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasiannya wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. Siagian (2003; 37) mendefinisikan organisasi sebagai

kelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Hasibuan (2004; 120) adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur dan terakomodasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan wadah atau alat dimana segenap keinginan dan kemampuan sejumlah atau sekumpulan orang bersatu, mengikat diri dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Menurut Nawawi (2008;13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah:

- 1) Manusia, yaitu: terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah atau organisasi tersebut.
- 2) Filsafat, yaitu: manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalin kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
- 3) Proses, yaitu: kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
- 4) Tujuan, yaitu: Organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesaamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan pengertian diatas terlihat unsur-unsur organisasi yang terdiri dari kumpulan orang atau sekelompok orang yang bekerja sama dengantujuan

bersama serta sumber daya manusia yang semuanya merupakan unsur penting dalam organisasi bila mana dikelola dengan baik maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal untuk mengelola sumber daya organisasi digunakan manajemen dan unsur-unsur dalam manajemen sebagai bagaian dari proses pencapaian tujuan.

E. Konsep Manajemen

Menurut Haiman (dalam manullang 2009; 3) mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Selanjutnya menurut Siagian (dalam Zulkifli.2005:11) batasan administrasi yang menekankan pentingnya aspek rasionalitas yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap organisasi perlu adanya penetapan fungsi-fungsi manajemen sebagai landasan pencapaian tujuan organisasi begitu juga dengan menggunakan fungsi manajemen pada kantor dinas kesejahteraan social Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tujuan dalam rangka kesejahteraan social masyarakat dan menjalankan program-program social.

Selanjutnya menurut Millet (dalam Sukarna 2011;12) menyatakan manajemen ialah proses bimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai satu tujuan dan pelaksanaan pekerjaan. Dalam menggerakkan organisasi harus melakukan fungsi-fungsi manajemen, menurut Terry (dalam Zulkifli;27) adalah sebagai berikut:

- a. Planning
- b. Organizing
- c. Staffing
- d. Controlling

Planning atau perencanaan menurut The Liang Gie (dalam zulkiffli,2005; 54) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu kegiatan menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya. Kemudian Organizing atau pengorganisasian menurut Siagian (2006; 118) adalah penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan. Selanjutnya Staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif akan mengisi jabatan-jabatan kosong diorganisasi perusahaan. Siagian (2006;173). Pengawasan menurut M. Manullang (2005: 173) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian, perekturan dan pengawasan sebagai pelaksana dalam sebuah organisasi khususnya organisasi public yaitu Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Maka untuk mengukur apa yang telah dicapai menyangkut kegiatan oleh suatu organisasi maka satu fungsi tambahan adalah evaluasi.

Evaluasi adalah fungsi terakhir yang berguna sebagai penilaian apakah suatu kegiatan dalam organisasi tersebut telah mencapai tujuan atau belum.

Suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan tes data yang di himpun dengan menggunakan angket, observasi dan wawancara atau bentuk instrument lainnya yang sesuai (Nurhasan 2001:3). Sedangkan menurut Brinkerhoff dalam sawitri (2007:3) evaluasi adalah penyelidikan (proses pengumpulan informasi) yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program professional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya.

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal senada dikemukakan oleh Djaali, Mulyono, dan Ramly (2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kreteria atau standard objektif yang dievaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan invetigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.

Selanjutnya menurut Nugroho (2011;52) Evaluasi merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberi umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas suatu program atau kegiatan.

F. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Istianto(2011:29) Manajemen Pemerintahan dapat diartikan secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan

demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2011: 159)

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160), antara lain : 1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi. 2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut

memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai. 3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan. 4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

G. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2001;105) Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternative; alternative, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana, keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan,
- d. Penilaian terhadap isi terhadap, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuata kebijakan.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Tangkilisan, 2003:2) yaitu:

- a. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum
- b. Kebijakan Publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro.

Selanjutnya istilah public dalam rangkaian kata public policy mengandung tugas konotasi pemerintah, masyarakat dan umum. Dari pengertian diatas kebijakan public adalah suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan public serta mencapai tujuan Negara. Khususnya dalam mencapai tujuan Negara yaitu Kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat kebijakan dan melaksanakan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

H. Konsep Analisis

Soejadi (1997:107) mendefinisikan analisis sebagai berikut : Analisis adalah serangkaian kegiatan pemikiran yang logis,rasional,sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan,untuk melakukan pengkajian,penguraian,perincian,pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen tang utuh kedalam sub atau komponen-komponen yang lebih kecil.

Menurut Wiradi (Hadiyanto dan Makinuddin,2006) Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu di golongkan dan dikelompokkan kembali menurut kreteria tertentu kemudian dicari maknanya dan ditafsir maknanya.

Selanjutnya komarudin (1994:31) mengemukakan analisis sebagai berikut : Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen,sehingga dapat mengenal tanda tanda komponen,hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan. Dari pengertian diatas maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara lain sebagai berikut:

1. Analisis merupakan suatu perubahan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
2. Mempelajari bagian dari bagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian.

Menurut Handoko (2000:24) analisis secara sistematis adalah mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi tentang sesuatu pekerjaan-pekerjaan.

I. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,

sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

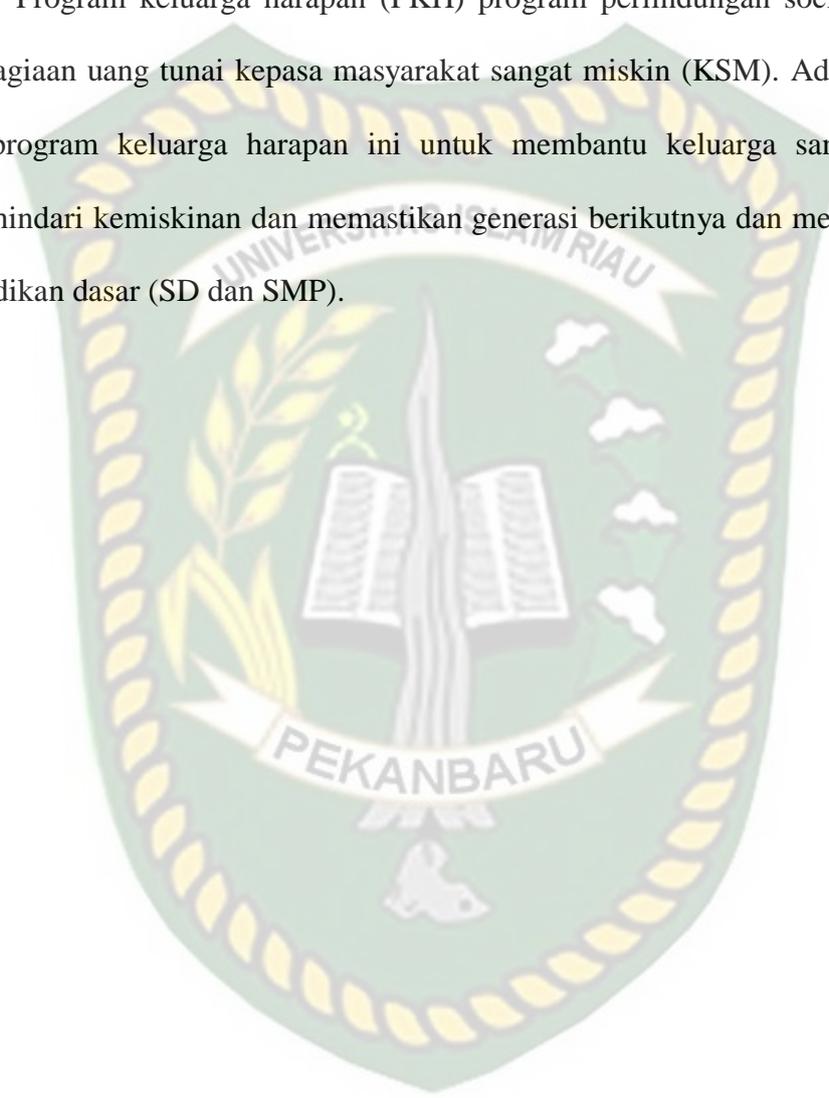
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. PKH akan memberikan bantuan kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia dilandasi dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional
2. Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,
3. Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,
4. PERPRES No. 15 tahun 2010 Tentang Program percepatan penganggulan kemiskinaan.
5. Inpres No 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan point lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan.
6. Inpres No 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi point lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi

penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta program keluarga harapan.

Program keluarga harapan (PKH) program perlindungan social memalui pembagiaan uang tunai kepada masyarakat sangat miskin (KSM). Adapun tujuan dari program keluarga harapan ini untuk membantu keluarga sangat miskin menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya dan menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP).



2. Penelitian Terdahulu

Tabel I.2 Kajian penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Slamet Riyadi	Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin (KSM) penerima Bantuan di kecamatan Gunung sugih kabupaten lampung tengah	Sama sama membahas tentang pelaksanaan PKH	Fokus penelitian terletak pada implementasi sedangkan peneliti fokus pada analisis
Ika Ayu Nurrohmah	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto	Sama sama membahas tentang Pelaksanaan PKH	Peneliti terdahulu menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif
Mohd Iqbal Abdul Muin	Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi	Sama sama membahas tentang PKH dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti terdahulu fokus pada Peran Dinas Sosial sementara peneliti sekarang terfokus pada Analisis saja

1	2	3	4
Fajrin Mahmud	Impementasi Kebijakan Peogram Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang	Sama sama menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu fokus pada impelementasi kebijakan sementara peneliti sekarang terfokus dengan analisis saja
Norsanti	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	Sama sama membahas tentang PKH dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti terdahulu menggunakan konsep Efektifitas sementara peneliti sekarang menggunakan konsep Analisis

3. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada studi pustaka yang dijadikan indicator penelitian tentang Analisisi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis menjelaskan mengenai gambaran kerangka pikiran yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.2 Kerangka Pikir penelitian tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Modifikasi peneliti 2020

4. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut:

5. Operasional Variabel

Tabel II.1 Konsep Operasional Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

konsep	variabel	indikator	item penilaian
1	2	3	4
Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 2008 : 39 Mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan dalam kebijakan.	Implementasi	1. ukuran dan tujuan kebijakan	1. mengurangi kemiskinan 2. meningkatkan kesehatan dan pendidikan
		2. sumber daya	1. sumber daya manusia 2. sumber daya waktu 3. sumber daya finansial
		3. agen pelaksana	1. daya dukung organisasi 2. nilai-nilai hubungan
		4. sikap para pelaksana	1. Demokratis 2. responsif
		5.komunikasi	1. rapat 2. koordinasi
		6. lingkungan	1. lingkungan sosial 2. lingkungan ekonomi 3. politik

Sumber : Olahan Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Intan Makmur Kabupaten Rokan Hulu, lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas bersangkutan merupakan instansi pemerintah yang menangani, mendukung dan menjalankan Program Keluarga Harapan dan Kecamatan Kunto Darussalam karena merupakan salah satu kecamatan yang memiliki RTSM dalam jumlah banyak.

C. Sumber Data Dan Tehnik Pengumpulan Data

A) Sumber data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. (Sugiyono, 2009:137) yaitu masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dan pendamping PKH.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. (Sugiyono, 2009:137) data berupa dokumen didapatkan dari kantor Kelurahan dan Pendamping PKH.

B) Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Arikunto menyatakan bahwa observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002:22). Dalam hal ini penulis melihat secara langsung beberapa proses awal pelaksanaan PKH di Desa Bukit Intan Makmur. Pengamatan dalam penelitian ini berawal dari survei mengunjungi kantor Kepala Desa Bukit Intan Makmur, menanyakan tentang adanya PKH di Desa Bukit Intan Makmur. Setelah itu penelitian dilakukan dengan melihat segala aktivitas masyarakat yang terjadi di Desa Bukit Intan Makmur, sosialisasi pendamping PKH terhadap KPM (keluarga penerima manfaat). Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti selanjutnya mentransformasikan temuan lapangan kedalam bentuk data kualitatif pada skripsi ini.

2. Wawancara

Dalam pencatatan data wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa alat tulis serta recorder handphone. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dan pendekatan dengan beberapa narasumber yang terkait, kemudian wawancara penelitian ini mengarah pada Proses Pelaksanaan PKH di Desa Bukit Intan Makmur.

3. Dokumentasi

Menurut Bungin dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik menyatakan bahwa dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. (Burhan, 2013) Dalam penelitian ini, peneliti memiliki dokumentasi yang berupa foto, rekaman suara wawancara.

C) Informan dan key forman

Menurut Sugiyono (2009: 221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Sugiyono:395):

1. Mereka yang menguasai atau memahami PKH di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kuntodarusalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti (PKH)
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai/dimintai informasi
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber

Dalam penetapan informan, penulis menggunakan tehnik purposive sampling (pengambilan informan berdasarkan tujuan), artinya orang yang dijadikan informan ditunjuk secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi, oleh karena itu teknik ini didasarkan atas kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam hal pengecekan tentang kebenaran hasil maka penulis mengambil beberapa informan diantaranya adalah:

1. Data Informan

NO	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial	1
2	Koordinator PKH	1
3	Pendamping PKH Desa Bukit Intan Makmur	1
4	Kepala Desa Bukit Intan Makmur	1
5	Peserta yang mendapatkan bantuan PKH	3
Jumlah		7

Sumber :Data Olahan Peneliti 2020

Key forman adalah orang yang tidak hanya bias memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bias memberikan sumber atau bukti yang dapat mendukung setra menciptakan suatu sumber yang aan diciptakan.

D) Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Artinya, untuk analisis data tidak dipergunakan model uji statistik melainkan lebih ditujukan model penyajian deskriptif. Ada tiga komponen dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2007:286).

- a) Reduksi data: Sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan abstraksi data dari catatan lapangan. Data ini dikelompokkan sesuai dengan masalah yang dikaji. Proses reduksi data berlangsung selama penelitian ini berlangsung.
- b) Penyajian data: Membandingkan dan menghubungkan semua data primer yang ditemukan di lapangan dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh di kepustakaan. Selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data tersebut, guna membagi konsep yang bermakna.
- c) Penarikan kesimpulan: Kesimpulan ini dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh dari data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (buku-buku, jurnal). Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperoleh, maka dilakukan penafsiran ulang terhadap kesimpulan.

E) Jadwal kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

2. Jadwal Penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darusslam Kabupaten Rokan Hulu

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 – 2021															
		Sept-Des				Jan-feb				Maret -juni				Juli-Oct			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■	■	■								
3	Perbaikan UP							■	■								
4	Revisi UP								■								
5	Rekomendasi UP									■	■	■	■				
6	Survey Lapangan	■	■	■	■							■	■				
7	Analisa Data											■	■				
8	Penyusunan Laporan Hasil Lapangan												■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi													■	■	■	■
10	Ujian Kompherensip Skripsi														■	■	■
11	Revisi Skripsi															■	■
12	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : modifikasi Peneliti 2021

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Bukit Intan Makmur

Pada awalnya Desa Bukit Intan Makmur merupakan semak belukar dan kebun karet tua serta berbagai kebun buah-buahan yang ditengah-tengah sebagai jalan lintas berbagai penduduk Desa tradisional sekitarnya yang berladang pindah-pindah disepanjang aliran sungai tersebut.

Desa Bukit Intan Makmur mulai berdiri pada tanggal 25 Desember 1990 melalui Program Transmigrasi STAP Pemukiman yang ke 5 atau disebut SP 5, pada awalnya penetapan penduduk dari berbagai daerah : Jawa Tengah, Jawa Barat. Local daerah setempat dan TSM (Trans Swakarya Mandiri) pecahan keluarga atau pecahan KK.

Nama Desa Bukit Intan Makmur awalnya adalah Desa Prambanan. Nama ini diambil dari nama daerah asalnya yang semula penduduknya asli orang Prambanan di Jawa. Kemudian nama Desa Bukit Intan Makmur berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan para tokoh, aparat desa, dan para alim ulama yang berpenduduk di desa tersebut, serta disaksikan oleh orang-orang dari kecamatan Kunto Darussalam. Nama Bukit diambil dari adanya Bukit yang diberi nama oleh penduduk sekitar dengan nama Bukit Pandan, dan nama Intan diambil dari nama daerah yang bernama Sei Intan, sedangkan akhiran Makmur ini menjadi do'a warga desa untuk menjadikan penduduk dan masyarakat yang tinggal di desa menjadi makmur dan sejahtera di masa yang akan datang.

Visi : Terwujudnya aparaturnya Pelayanan yang profesional menuju pemerintahan yang baik.

Misi :

- Tabel III.1 Meningkatkan kompetensi aparaturnya pemerintahan yang profesional
- Tabel III.2 Meningkatkan kinerja pelayanan yang akuntabel
- Tabel III.3 Meningkatkan penguasaan IPTEK dalam mendukung pelayanan.
- Tabel III.4 Mewujudkan aparaturnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

B. Letak Geografis

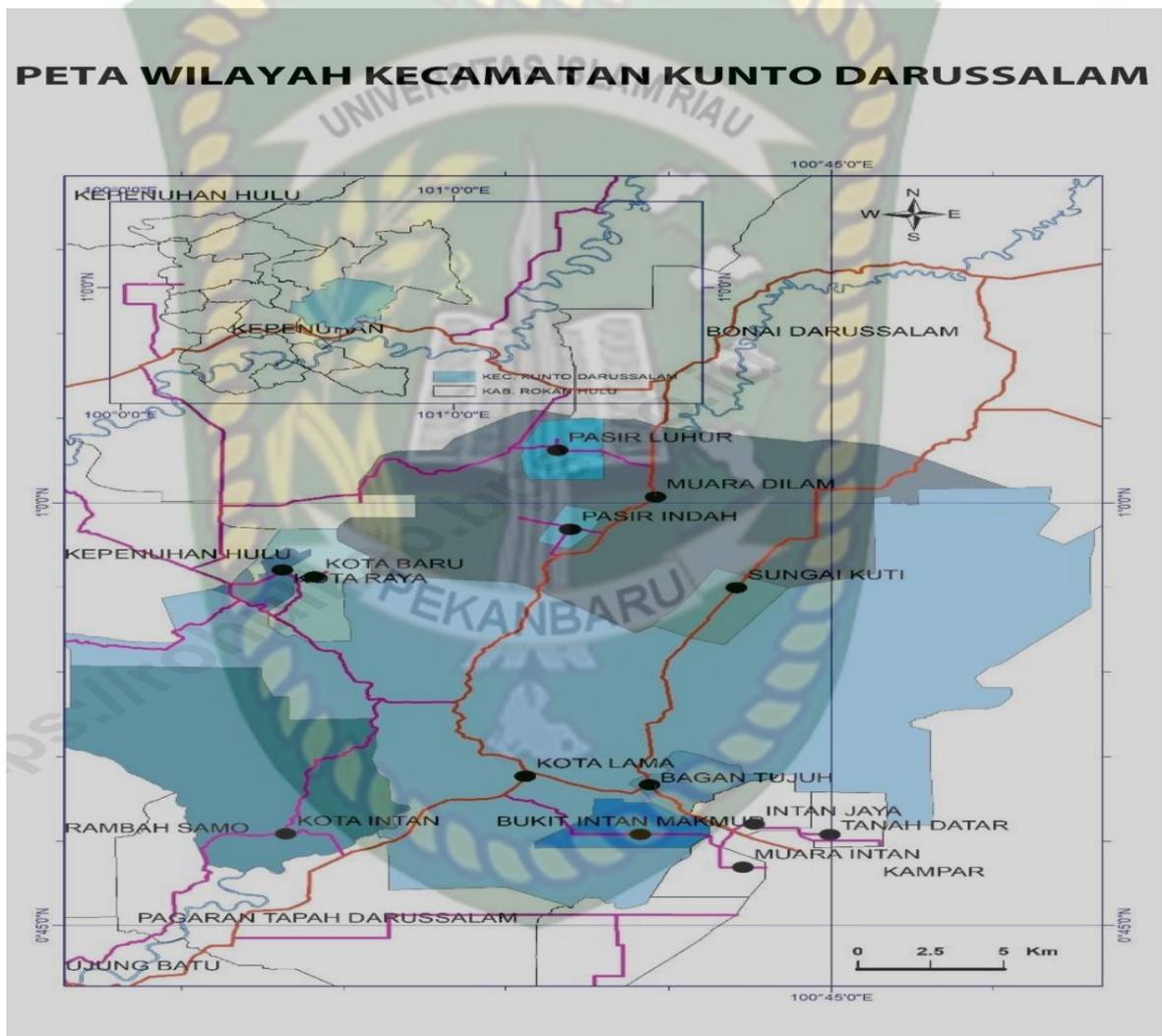
Desa Bukit Intan Makmur adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Memiliki luas wilayah 890 Ha. Jarak ke ibu kota Kabupaten 79 KM. lama jarak tempuh ke ibu kota 100 menit. Desa bukit Intan Makmur terbagi dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : Jumlah 1 RW dan 4 RT
2. Dusun II : Jumlah 1 RW dan 4 RT
3. Dusun III : Jumlah 1 RW dan 5 RT

Adapun batas wilayah Desa Bukit Intan Makmur yaitu :

1. Sebelah Utara Desa Bagan Tujuh
2. Sebelah Timur Desa Muara Intan
3. Sebelah Selatan Desa Rimba Jaya
4. Sebelah Barat Kelurahan Kota Lama.

Sebagian besar penduduk wilayah Desa Bukit Intan Makmur terdiri dari lahan perkebunan sawit. Lokasi. Sebagian besar masyarakat Desa Bukit Intan Makmur berprofesi sebagai petani sawit dan disamping itu juga berprofesi sebagai guru, pedagang, wiraswasta, PNS.



Gambar 1.3 Peta Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam

Sumber : Website Kabupaten Rokan Hulu

C. Tujuan Pokok dan Fungsi Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kemudian fungsi dari PKH adalah program yang telah dicanangkan sejak tahun 2007. Dengan PKH keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditentukan akan mendapat bantuan dana pada periode tertentu. sementara fungsi PKH sendiri untuk memberikan bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.

D. Demografis

Kependudukan di Desa Bukit Intan Makmur dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

Tabel IV.I Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah KK
1	Laki laki	961	-
2	Perempuan	911	-
	Jumlah	1872	543

Dokumentasi Kantor Desa Bukit Intan Makmur 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan dan jumlah KK yang berada di Desa Bukit Intan Makmur ada 543 KK.

Tabel IV.2 Pemeluk Agama Yang Ada Di Bukit Intan Makmur

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	1866
2	Kristen	6
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	1872

Dokumentasi Kantor Desa Bukit Intan Makmur 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya di Desa Bukit Intan Makmur mayoritas beragama islam dengan jumlah 1866 orang,agama Kristen 6 orang.

Tabel IV.3 Suku Yang Ada di Desa Bukit Intan Makmur

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	1678
2	Melayu	15
3	Minang	12
4	Batak	13
Jumlah		1872

Dokumentasi Kantor Desa Bukit Intan Makmur 2021

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya Desa Bukit Intan Makmur terdapat suku jawa berjumlah 1678 orang, suku melayu berjumlah 15 orang, suku minang 12 orang, dan suku batak berjumlah 13 orang.

1. Sarana dan Prasarana Desa Bukit Intan Makmur

Sarana dan Prasarana Desa Bukit Intan Makmur setidaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bukit Intan Makmur dalam rangka mengisi aktifitas dalam kehidupan masyarakat tersebut. Desa Bukit Intan Makmur memiliki beberapa sarana dan prasarana umum dibeberapa aspek yaitu :

Tabel IV.4 Sarana dan Prasarana Desa Bukit Intan Makmur

NO	Jenis	Jumlah
1	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar (SD)	1
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
5	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1

8	Masjid	3
9	Musolla	8
10	Lapangan Bola Kaki	1
11	Lapangan Bola Volley	1
12	Puskesmas	1
Jumlah		21

Dokumentasi Kantor Desa Bukit Intan Makmur 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya Desa Bukit Intan Makmur memiliki sarana dan prasarana yaitu terdapat 1 Pendidikan Usia Dini (PAUD), 1 Taman Kanak-Kanak (TK),1 Sekolah Dasar,1 Madrasah Ibtidaiyah (MI),1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP ,1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),4 Masjid, 8 musolla, 1 Lapangan Bola Kaki, 1 Lapangan Bola Volley, dan 1 puskesmas.

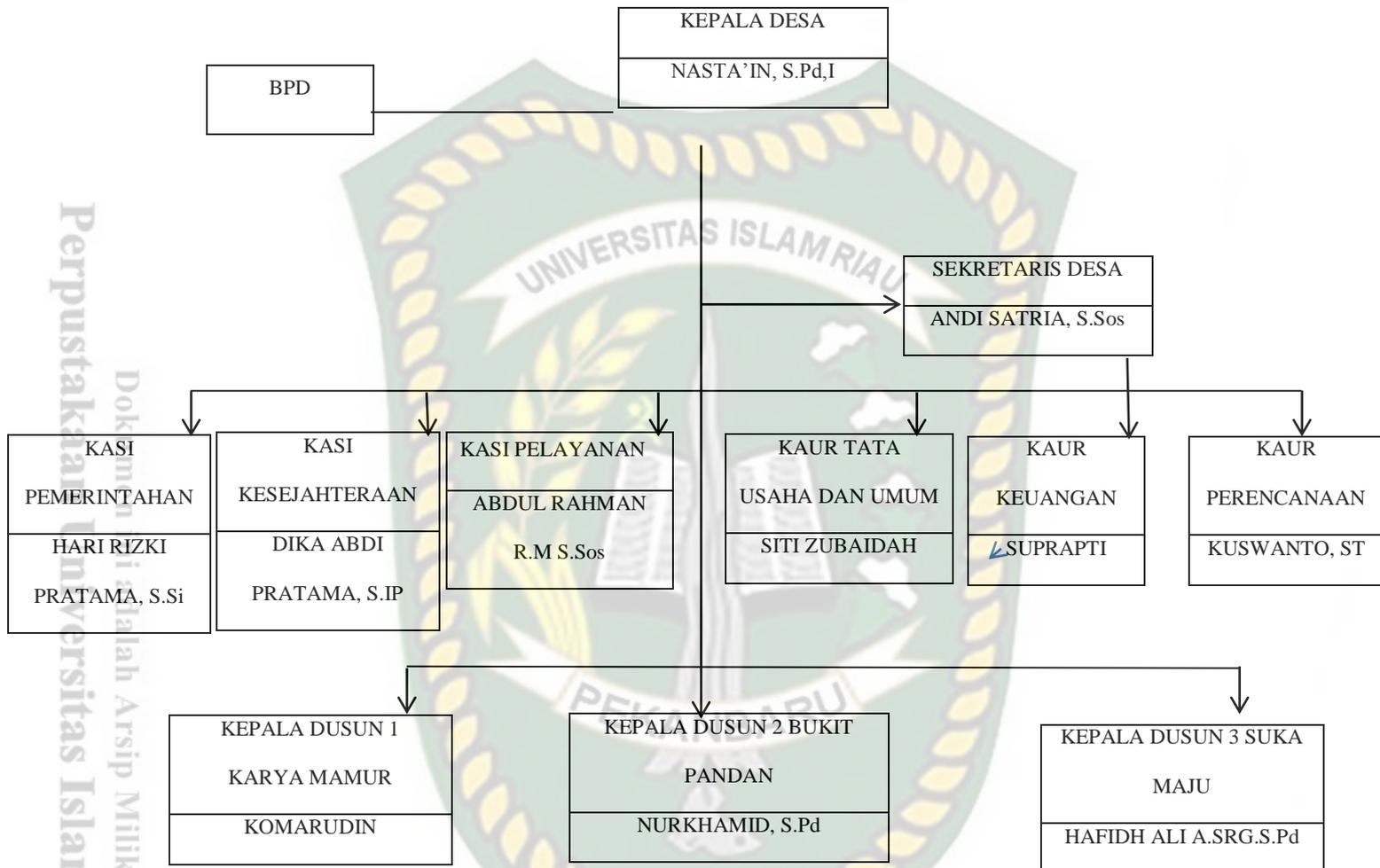
Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	29
2	SD	139
3	SMP	104
4	SMK	27
5	DIPLOMA/S1	6

Menurut tabel diatas status pendidikan penduduk saat ini yaitu TK/PAUD 29 orang,SD 139 orang,SMP 104 orang,SMK 27 orang dan Diploma/S1 6 orang.

Tabel IV.6. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Bukit Intan Makmur

Tahun 2021



Sumber : Struktur Organisasi Bukit Intan Makmur

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Suatu pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, salah satunya pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangat wajar. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Sosial Rokan Hulu, Koordinator PKH Rokan Hulu, Pendamping PKH Desa Bukit Intan Makmur, Kepala Desa Bukit Intan Makmur dan Masyarakat yang menerima bantuan PKH. Untuk mengetahui identitas key informan dan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.V.I. Identitas Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	April Iyadi SE,M.Si	Kepala Dinas Sosial	Key informan
2	Suhatman S.Ip	Koordinator PKH	Informan
3	Nastain S.Pd.I	Kepala Desa	Informan
4	Ria Susanti	Pendamping PKH	informan
5	Ratna Intan	Masyarakat	informan
6	Samiati	Masyarakat	informan
7	Sarmiati	Masyarakat	Informan

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa informan penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 key informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu.

1. Usia Informan

Usia informan salah satu faktor yang menentukan penjelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan peneliti butuhkan.

Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan yang harus dilakukan, sehubungan dengan keterkaitan antar umur dan kdewasaan seorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka dapat dilihat dari kreteria umur informan sebagai berikut:

Tabel.V.2. Usia Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Tingkatan umur	Jumlah
1	20-30	1
2	30-40	3
3	40-50	3
	Jumlah	7

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key forman dan informan yang terdiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu dengan kreteria umur 20-60 tahun.

2. Jenis kelamin informan

Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Mengapa jenis kelamin tidak berpengaruh, karena jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.3. Jenis Kelamin Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	4
Jumlah		7

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, Koordinator PKH Kabupaten Rokan Hulu, Pendamping PKH Desa Bukit Intan Makmur, Kepala Desa Bukit Intan Makmur dan masyarakat Desa Bukit Intan Makmur, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 3 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan menjawab dari setiap jawaban informan tidak akan sama persis antara jawaban key informan dan infroman lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informan juga tidak akan terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia jalani.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darusslama Kabupaten Rokan Hulu, dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.4. Tingkat Pendidikan Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
4	Diploma III(D3)	-
5	Strata Satu (S1)	3
	Jumlah	7

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebanyak 3 orang berpendidikan S1,2 orang berpendidikan SMA,1 orang berpendidikan SMP dan 1 orang berpendidikan SD.

**B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten
Rokan Hulu**

Salah satu peran pemerintah yang sangat penting mulai dari pusat yang didelegasikan sampai ke daerah adalah urusan pelayanan dasar sosial. Urusan pelayanan sosial ini adalah urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Ada beberapa bentuk bantuan dari pemerintah salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) program PKH ini adalah kebijakan yang menysasar pada public.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. PKH akan memberikan bantuan kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi.

Fungsi dari program ini adalah untuk membantu biaya hidup masyarakat penerima PKH atau masyarakat penerima manfaat untuk membayar biaya bulanan pendidikan, biaya kesehatan anak balita, ibu hamil dan biaya kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas. Masyarakat yang akan menerima bantuan ini harus dapat menyetujui komitmen yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk sebagai coordinator kabupaten dan pendamping peserta serta anggota kelompok petugas lapangan. Tujuan adanya surat ini adalah sebagai jaminan bahwa jika dikemudian hari ada peserta yang melanggar dan tidak menaati peraturan yang dibuat oleh petugas maka peserta tersebut akan di cabut atau tidak diberlakukan lagi dan peserta dapat dikeluarkan dari peserta PKH atau penerima manfaat oleh pendamping PKH.

Masyarakat yang mendapat bantuan dan menjalankan komitmen diharapkan agar dapat senantiasa menaati segala peraturan yang telah dibuat oleh petugas coordinator dan pendamping PKH dan yang telah disepakati bersama dan dibuat bersama oleh Kementerian Sosial bersama petugas dilapangan walaupun sudah ada peraturan tetap saja masih ada petugas atau KPM yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan belum paham benar akan fungsi program PKH ini, bagaimana menjalankan tugasnya dilapangan. Ditemukan juga diantara keluarga penerima manfaat ada sebagian yang tidak mengerti menggunakan uang bantuan yang diberikan untuk hal lainnya, seperti memakai untuk keperluan pribadi bukan untuk hal yang telah disepakati sewaktu penandatanganan komitmen.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penulis menempatkan beberapa indikator yang akan dijelaskan

berdasarkan hasil dari pertanyaan wawancara dan jawaban dari petugas lapangan dan beberapa masyarakat yang menerima bantuan PKH yang penulis tanyakan seaktu observasi lapangan bagaimana pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan ini.

Penulis melakukan wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, Koordinator PKH Rokan Hulu, Pendamping PKH Desa Bukit Intan Makmur, Kepala Desa Bukit Intan Makmur, dan beberapa masyarakat penerima bantuan sosial PKH. Pertanyaan yang disampaikan kepada key informan sama dengan pertanyaan yang disampaikan kepada informan. Ini dilakukan agar jawaban semua informan selaras. Jika jawaban antara key informan dan informan tidak selaras maka program ini tidak berjalan dengan semestinya.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu maka dapat dilihat dari penjelasan berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan suatu indikator apakah suatu penelitian apakah hasil yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan program telah tercapai atau apakah tujuan dari adanya kebijakan program tersebut telah terpenuhi.

Menurut Van Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja kebijakan tentu nya standard dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingan ketecapaian standar dan sasaran tersebut.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait pengetahuan tentang apakah program PKH sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia :

Menurut April Liyadi,S.E,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, Ria Susanti selaku pendamping PKH Desa Bukit intan Makmur mengatakan “ ukuran program PKH ini *cukup mengurangi kemiskinan, karna setiap waktu ada KPM PKH yang melakukan graduasi, graduasi itu artinya mereka keluar dari KPM PKH atau mereka keluar secara mandiri dan ada yang dikeluarkan memakai system berdasarkan informasi dari pendamping atau koordinator PKH itu sendiri. walaupun kendalanya saat ini masih ada masyarakat yang menurut kita sudah mampu tapi tidak mau keluar secara mandiri dan saat ini cukup berhasil mengurangi kemiskinan.dan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini salah satu tujuan dari program PKH ini selain dapat mengurangi kemiskinan dan pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia saya rasa PKH ini berperan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia apabila didalam keluarga itu terdapat anak yg masih sekolah SD,SMP,SMA mereka dapat bantuan dengan tujuan agar anaknya dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang yang telah ditentukan.(04 agustus 2021)*

Penjelasan tidak jauh berbeda dengan informan berikutnya yaitu :

Menurut Suhatman S.Ip selaku coordinator PKH Kabupaten Rokan Hulu mengatakan “*kalau secara keseluruhan iya dapat mengurangi kemiskinan,karna kita sudah menggraduasi itu semuanya berjumlah 5539 KPM,karna juga termasuk data yang kita keluarkan yang sudah meningkat ekonominya kita keluarkan dari penerima PKH ini, jika ada yang belum mampu maka tetap mendapatkan bantuan ini. Kalau untuk rohul belum semua mendapatkan PKH,karna di data kita ada sekitar 30 ribuan jika ditotal semuanya sama graduasi yang dikeluarkan baru sekitar 19 ribu yang mendapatkan PKH.berarti masih ada sekitar 10 ribuan data lagi yang belum termasuk mendapatkan PKH.untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini pkh cukup berperan ya karna dgn adanya pkh ini mereka dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA.(04 agustus 2021)*

Kemudian Suhatman S.Ip juga menjelaskan program PKH sudah berhasil meningkatkan program kesehatan dan pendidikan yaitu :

“kalau hasil penelitian dari WHO di Indonesia ini semenjak adanya program PKH itu meningkat kunjungan ibu hamil, anak balita keposyandu berarti istilahnya kan dengan adanya program PKH ibu hamil dan balita dapat mengunjungi posyandu atau puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. program pkh dapat diukur dengan melihat kesehatan dan pendidikan masyarakat atau peserta PKH ini maka dalam hal ini memerlukan waktu yang tidak sedikit karena kita juga bertugas dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan serta data dari coordinator dan pendamping pkh. Sama dengan pendidikan itu anaknya harus datang ke sekolah minimal 85% kalau dibawah itu nanti anak tersebut sangsi karna PKH itu kan istilahnya ada hak dan kewajiban. Kalau hak nya itu tadi mendapatkan bantuan sosial kewajibannya itu tadi harus periksa di puskesmas atau posyandu untuk ibu hamil dan balita” (04 Agustus 2021)

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan pihak desa, yaitu :

Menurut Nastain S.Pd.i mengatakan

“ Program Keluarga Harapan disini sangat membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Bukit Intan Makmur, dengan adanya Program ini masyarakat yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA yang tadinya mereka tidak dapat melanjutkan sekolah dengan adanya PKH ini mereka bisa bersekolah hingga jenjang yang ditentukan. Dengan adanya program ini penerima sangat terbantu dibidang pendidikan dan kesehatan, karna kan bagi ibu hamil dan balita dapat memeriksakan diri ke pusyandu atau puskesmas dan untuk pendidikan anak anak dapat hadir minimal 85% kehadirannya di sekolah. dan bukan juga mereka bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan bagaimana jalannya PKH ini nantinya apakah sudah berhasil atau belum. dan juga PKH ini selain dapat mengurangi kemiskinan mereka juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa ini seperti halnya dapat menyekolahkan anak hingga jenjang SMA itu tadi. (03 Agustus 2021).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan Program Keluarga Harapan ini dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan di Desa Bukit Intan Makmur selain membantu mengurangi kemiskinan dengan adanya Program ini juga membatu fasilitas pendidikan dan kesehatan dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mereka juga bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan dalam membangun program tersebut.

Kemudian penulis merasa belum puas dengan hasil wawancara diatas maka penulis membutuhkan penjelasan dari masyarakat terkait tentang apakah PKH ini sudah berhasil mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi penerima PKH.

Ratna Lestari Ibu Rumah Tangga(IRT) juga sebagai penerima bantuan PKH mengartakan

“Alhamdulillah setelah adanya Program PKH ini diadakan banyak warga yang terbantu dalam masalah ekonomi yang kronis,dan penerima PKH ini dapat menyekolahkan anaknya hingga kejenjang SMA menurut saya program ini sangat membantu sekali ya,mba. Selain membantu mengurangi kemiskinan dengan adanya program ini sangat mebantu menunjang masalah kesehatan dan pendidikan anak-anak di negri kita ini,dari yang seharusnya mereka tidak dapat melanjutkan sekolah akhirnya dapat terbantu dengan adanya program ini,begitupun dengan kesehtan bagi ibu hamil dan balita dapat memerikasakan diri ke puskesmas atau keposyandu yang ada di desa kualitas sumber daya manusia dsini cukup meningkat dengan adanya program tersebut..(03 Agustus 2021)

Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan ini sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi penerima PKH yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan Desa Bukit Intan Makmur dan juga membantu meningkatkan program kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil obeservasi penulis dilapangan bahwasannya program PKH sudah berjalan dengan baik dan berhasil mengurangi kemiskinan dan berhasil

meningkatkan program kesehatan dan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi penerima PKH.

2. Sumber Daya

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka.

Menurut Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut pegawai, personil, tenaga kerja dan lain-lain.

Sumber daya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sumber daya manusia sudah berhasil meningkatkan sumber daya manusia bagi peserta PKH dalam menjalankan program tersebut.

Untuk pelaksanaan suatu program tentu harus memahami dulu bentuk peningkatan sumber daya manusia nya seperti apa, sehingga penulis perlu menanyakan terkait peningkatan sumber daya manusia PKH itu seperti apa.

Menurut koordinator PKH Suhatman S.IP minkatan sumber daya manusia bagi peserta PKH yaitu :

“dari data yang sudah kita keluarkan artinya ekonominya sudah meningkat. Program ini membantu masyarakat yang tidak mampu artinya dibantu oleh pemerintah dengan beberapa komponen yang didalamnya ada beberapa sub komponen artinya secara langsung masyarakat dibantu tidak perlu memikirkan biaya sekolah, kesehatan dan desabilitas. terkait pemberdayaan masyarakat yang dari awal sudah dibentuk dikarenakan pola pikir yang rendah dan pengetahuan yang rendah mengakibatkan pemberdayaan susah dibentuk maka dengan adanya program ini kita dapat mengayomi ibu ibu untuk diberikan edukasi dan diberikan bantuan pendidikan dan kesehatan (04 Agustus 2021)

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal serupa kepada pendamping PKH Ria Susanti ia mengatakan bahwa :

“kalau dibilang meningkatkan sumber daya manusia iya meningkatkan karna kita memberikan edukasi juga kepada setiap KPM itu setia bulannya melalui program P2K karna ibu-ibu disini kan pola pikirnya rendah jadi dengan adanya program ini kami pendamping mengarahkan ibu ibu untuk membuka usaha dll yang dapat membantu ekonomi keluarga jadi bantuannya tidak dapat dr program ini saja.(02 Agustus 2021)

Dari jawaban jawaban diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan SDM bagi peserta PKH harus adanya bimbingan pengarahan dari pendamping atau orang yang bersangkutan dalam program PKH ini.

Kemudian penulis menanyakan kepada Kepala Dinas Sosial kabupaten Rokan Hulu mengenai ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan PKH. April Liyadi S.E,M.Si mengatakan :

“mereka menyalurkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan,artinya mereka berpedoman pada petunjuk yang sudah ditetapkan periode pencairannya dan hanya ada beberapa orang yang tidak hadir pada saat penyaluran dana namun itu tidak hilang,mereka tetap akan menerima bantuan tersebut, tepat waktu si tepat waktu karna itu tadi ada priode yang ditentukan dan biasanya

penerima bantuan sudah tau waktunya kapan menerima bantuan nya,kalau tidak salah mereka ada kelompoknya ya jadi pendamping memberi tahu ketua kelompoknya untuk mengambil bantuan dan ketua kelompoknya menmberi tau kepada kelompoknya bahwa bantuan sudah bisa diambil. ” (04 agustus 2021)

Selanjutnya penulis juga menanyakan langsung kepada penerima bantuan PKH ini. Ratna Lestari mengatakan :

“sejauh ini selama saya mendapatkan bantuan PKH ini penyaluran bantuan ini tidak pernah mengulur-ngulur waktu penyaluran nya, dibilang bisa tepat waktu ya,mungkin kalo ada kendala di pusat jadi penyalurannya agak sedikit terhambat. Dan pendamping juga meberi tau kepada ketua kelompok untuk mengambi bantuan dan ketua memberi tahu kelompoknya kalau bantuannya sudah bisa di cairkan.(03 agustus 2021)

Berdasarkan hasil kesimpulan observasi penulis dapatkan bahwasannya dalam meningkatkan SDM dan meningkatkan sumber daya waktu bagi peserta penerima PKH ini sudah berjalan dengan baik. Kerena pendamping membentuk kelompok penerima PKH ini menjadi beberapa kelompok agar pendamping bisa memberikan informasi kapan bantuan tersebut dicairkan. Sehingga bantuan tersebut tepat waktu dalam pencairan dana.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada informan informan tentang apakah program PKH sudah mampu meningkatkan sumber daya finansial atau keuangan bagi penerima PKH.

Menurut pendamping PKH Ria susanti mengatakan :

“selain sumber daya manusia disini saya sebagai pendamping memotivasi ibu ibu yang mau mempunyai keterampilan dalam artian ibu ibu pkh dsini dapat menghasilkan uang tambahan dengan membuka usaha kecil-kecilan yang bisa membantu perekonomian mereka sehari-hari misalnya seperti membuat kue,membuka warung makan dan lain sebagainya itu kita support dan memberikan gambaran bahwasannya dengan keterampilan ini secara tidak

sadar mereka sudah meningkatkan sumber daya financial begitu.(03 Agustus 2021)

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa Bukit Intan Makmur dan Koordinator PKH :

“mereka ini kan dibantu dari pendidikan dan kesehatan dan pendamping juga memberikan ide untuk membuka usaha agar penerima pkh ini mempunyai penghasilan tambahan untuk kehidupan sehari-hari mereka jadi tidak hanya mengandalkan dari bantuan PKH ini (04 agustus 2021)

Selanjutnya peneliti merasa belum puas dengan jawaban informan-informan tersebut maka peneliti mewawancarai salah satu masyarakat penerima PKH :

“Pendamping PKH ini juga memberikan masukan kepada ibu-ibu penrima PKH disini dapat membuka usaha kecil-kecil an seperti jualan makanan dan lain sebagainya mereka juga sangat mensupport yaa, dan hasilnya bisa untuk menambah penghasilan perekonomian sehari-hari juga atau bisa di tabung untuk masa yang akan datang.(03 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil jawaban-jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya financial disini meningkatkan sumber daya finansial cukup baik, karena pendamping dapat memotivasi penerima PKH untuk membuka usaha agar dapat menambah penghasilan perekonomian sehari hari bagi penerima PKH.

3. Agen Pelaksana

Menurut Ripley 1973 agen pelaksana yang meliputi karakteristik, norma pola dan hubungan yang potensial maupun actual. Van meter dan van horn menyatakan bahwa agen pelaksana dilihat dari struktur birokrasi. Stuktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki.

Agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Penulis melakukan wawancara dengan informan-informan yang ada guna mengetahui peran organisasi penting dalam mendukung terlaksananya program PKH ini dan bagaimana hubungan antara operator, pendamping serta masyarakat penerima bantuan.

Koordinator PKH Kabupaten Rokan Hulu Suhatman S.Ip mengatakan “ :

menurut saya peran organisasi disini itu sangat penting dalam mendukung adanya kegiatan PKH ini, karna dengan adanya dukungan dari atasan, dengan adanya program PKH ini kita saling memerlukan dukungan mereka juga berperan sebagai mengawasi jalannya program PKH, kemarin juga terjadi kasus penyalahgunaan atau tindakan melenceng dari program ini mereka bisa menegur atau memberi teguran kepada pendamping atau masyarakat yang menerima bantuan ini. kadang ibu-ibu ini tidak menggunakan bantuan ini sesuai dengan prosedur mereka malah menggunakan bantuan ini untuk keperluan lain jadi pihak pendamping menegurnya agar bantuan ini dapat digunakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. program PKH ini dan mereka juga bekerja sama dengan agen yang ada di desa seperti agen mandiri yang membantu masyarakat penerima PKH ini dapat mencairkan bantuannya di agen tersebut. kalau hubungan antara operator pendamping dan masyarakat PKH sangat baik sebab dengan adanya pendamping para penerima PKH dapat terbantu seperti terjadinya kerusakan kartu dan lain sebagainya pendamping siap membantu mereka yang mempunyai problem dalam PKH ini. (04 Agustus 2021)

Kemudian penulis mewawancarai Kepala Desa Bukit Intan Makmur Nastain

S.Pd.i mengatakan :

“ mendukung sekali ya, karna selain kepala desa yang mendukung adanya program ini mereka juga bekerja sama dengan agen mandiri yang ada di desa, jadi pemerintah menyediakan agen di desa agar penerima bantuan dapat mencairkan bantuannya melalui agen tersebut tujuannya penerima PKH tidak perlu jauh-jauh untuk mencairkan bantuannya atau mereka ada

yang menyalahgunakan bantuan itu tidak sesuai dgn prosedurnya maka pendamping pkh ini menegurnya agar sebaiknya bantan ini digunakan dgnn semestinya. .”(03 Agustus 2021)

Berdasarkan jawaban-jawaban yang penulis dapatkan, bahwa peran organisasi PKH dalam mendukung terlaksananya program PKH ini sangat mendukung bahkan mereka juga bekerja sama dengan agen mandiri yang ada didesa agar penerima bantuan PKH ini dapat mencairkan bantuannya melalui agen yang ada didesa dan tidak perlu jauh-jauh untuk mencairkan bantuannya dan mereka juga menegur penerima PKH ini yang menggunakan bantuannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat penerima PKH mengenai pentingnya peran pendukung organisasi terhadap terlaksananya program PKH ini, Ratna Lestari mengatakan :

“peran organisasi ini sangat mendukung sekali dengan adanya PKH ini, karan kan setiap organisasi pasti ada yang mendukung ya apalagi ini mengenai bantuan masyarakat miskin pasti mendukung seekali, kalau ada yang menyalahgunakan bantuan itu ya biasanya pendamping menegur agar mereka sadar bantuan itu untuk digunakan untuk kesehatan dan pendidikan bukan yang lainnya. ”(03 Agustus 2021)

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran organisasi dalam mendukung PKH ini mereka sangat mendukung adanya program PKH didesa apaalagi program ini sangat membantu masyarakat miskin terutama masalah kesehatan dan pendidikan. pendamping juga turut membantu peserta PKH yang mengalami kerusakan kartu atau yang lain sebagainya.

4. Sikap Para Pelaksana

Menurut Van meter and Van Horn sikap para pelaksana yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Sikap para pelaksana adalah diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program.

Sikap para pelaksana penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sikap para pelaksana program PKH ini sudah bersifat demokratis.

Sebelum penulis mencari tahu apakah program PKH ini sikap para pelaksananya sudah bersikap responsive atau belum, maka penulis mewawancarai informan bagaimana sikap para pelaksana masyarakat saat dilapangan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu April Liyadi S.E,M.Si mengatakan :

“kalau dibilang demokratis ya sudah ya, karna yang kita dampingi ini berbagai macam suku berbagai macam kepercayaan dan kita disini tidak mebeda bedakan semuanya dilayani sesuai dengan yang sudah ditetapkan”(04 Agustus 2021)

Pendamping PKH Ria Susanti mengatakan :

“sangat demokratis sekali ya ini, karna kan saya bekerja sesuai dengan prosedur dari atasan jadi ya kita tidak memilih milih dalam melaksanakan

tugas dari mereka, dan sesuai dengan tuntutan kerjanya ada prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan. (04 Agustus 2021)

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Koordinator PKH terkait dengan sikap para pelaksana sudah bersikap responsive dalam pelaksanaan program PKH ini.

Suhatman S.Ip mengatakan

“semuanya sangat responsive, yang tidak responsive itu yang tidak terima itu fanismennya itu, ada yang kami kelurkan menjadi pendamping diakrenakan dia tidak responsive dan juga melanggar aturan yang sudah dibuat kementerian maka kementerian mengeluarkan pendamping tersebut. Secara keseluruhan rokan hulu ini baik cuman ya namanya orang kan sifat berbeda-beda tp rata-rata bagus (04 Agustus 2021)

Menurut Ratna Lestari sebagai penerima PKH mengatakan

“ sikap para pelaksana disini sangat responsive ya terutama pendamping PKH disini kalau ada penerima ada masalah dalam bantuan PKH ini beliau langsung merespon tidak menunggu lama karna sikap pendamping disini sangat cekatan orangnya jadi masalah kami dapat cepat teratasi.

Berdasarkan hasil jawaban informan-informan diatas bahwa dapat disimpulkan sikap agen pelaksana Program PKH disini ngata demokratis dan sangat responsive dalam membantu penerima PKH yang mengalami problem dalam penerimaan bantuan PKH ini.

5. Komunikasi

Komunikasi adalah mekanisme prosedur yang direncanakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah di susun dengan cara menyebarkan informasi. Komunikasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat berupa sosialisasi

serta penyebaran informasi tata cara, ketentuan dan mekanisme dalam suatu kebijakan khususnya Program Keluarga Harapan kepada kelompok sasaran yaitu keluarga.

Dedy Mulyana juga memberikan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan pendapat para ahli :

Theodore M. Newcomb, “Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.”

Pelaksanaan komunikasi dapat berupa sosialisasi atau dilakukan langsung oleh pelaksana misalnya dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Desa maupun pendamping PKH melalui cara-cara yang dibuat sehingga dapat mendundung masyarakat dan calon peserta PKH, sehingga hasilnya program PKH akan menyebar secara merata. Informasi selanjutnya yang di dapatkan mengenai komunikasi dilakukan. Penulis melakukan wawancara kepada informan-informan mengenai rapat dan koordinasi dengan pihak luar atau instansi lainnya untuk pelaksanaan Program PKH tersebut.

Kepala Dinas Sosial dan Kepala Desa mengatakan :

“kalau komunikasi secara umum sudah ada melalui media massa, elektronik dan selebaran-selebaran yang disebar di kantor kecamatan dan kantor kepala desa dan pendamping juga membantu menyebar luaskan dan mengenai rapat diluar instansi itu ada karna PKH ini kan menangani kasus kemiskinan dan kesehatan jadi kami berkerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan untuk menjalankan program tersebut.(04 Agustus 2021)

Pendamping PKH dan Koordinator PKH mengatakan

“mengenai rapat yang diadakan ini kami selaku pendamping dan coordinator PKH akan melakukan peertemuan dengan dinas pendidikan dan kesehatan guna berjalannya program ini dengan baik. Karna PKH ini merujuk ke kedehatan dan pendidikan jadi kami melakukan kerjasama dengan dinas tersebut”(04 Agustus 2021)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat penerima

PKH Ratna Lestari mengatakan :

“ Setau saya program Ini bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan ya mba, karna kan program ini mengarah ke pendidikan dan kesehatan yang ada di desa jadi dapat dikatakan ada nya instansi atau pihak luar dalam pelaksanaan program ini. (03 Agustus 2021)

Berdasarkan jawaban yang ada dapat disimpulkan bahwa adanya rapat dengan pihak luar dan koordinasi dengan pihak luar guna menjalankan program PKH tersebut telah dimudahkan dengan adanya media massa dan pelaksana program juga agen pelaksana berperan aktif dalam komunikasi guna kelancaran pendistribusian informasi dan bantuan PKH yang di dapatkan oleh masyarakat.

6. Lingkungan

Lingkungan adalah suatu kebijakan yang akan dijalankan meliputi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Indikator ini dimaksudkan adakah pengaruh suatu kebijakan ini terhadap lingkungan masyarakat, peeningkatan ekonomi ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku atau pengetahuan tentang politik atau pemerintahan.

Penulis melakukan wawancara kepada informan-informan mengenai program PKH dapat mendukung lingkungan sosial dan interaksi antar masyarakat cukup baik di daerah penerima PKH.

Pendamping PKH dan coordinator PKH mengatakan :

“Dengan bantuan ini kondisi sosial disini sangat baik dan taraf hidup keluarga pun akan terus meningkat. Mereka juga berterima kasih dengan adanya program ini karena sangat membantu mereka secara finansial, secara ekonomi jadi sangat mendukung sekali, interaksi antar pendamping dan penerima PKH cukup baik sekali.” (04 Agustus 2021)

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Desa mengatakan :

“ sangat mendukung sekali kalau disini ya, dengan begitu kan lingkungan sosial disini dapat meningkatkan lingkungan sosial yang sangat baik begitu juga dengan interaksi antar masyarakat dengan pendamping sudah cukup baik.(04 Agustus 2021)

Kemudian menurut ibu Samiati mengatakan

“ lingkungan sosial disini sangat baik dan saya mendukung sekali dengan adanya program ini karna dapat membantu kami masyarakat miskin yang ada disini. Begitu juga interaksi antara pendamping dan masyarakat disini sudah cukup baik.(03 Agustus 2021)

Kemudian penulis mewawancarai kepala Dinas Sosial, Kepala Desa Bukit Intan Makmur dan Koordinator PKH mengenai program PKH dapat mendukung lingkungan ekonomi sekitar beliau mengatakan

“ lingkungan ekonomi di daerah penerima PKH disini cukup baik setelah adanya Program PKH ini mereka sangat berterima kasih sekali karena program ini dapat membantu mereka yang ekonominya kurang mampu dan mereka juga dapat menyekolahkan anak nya sesuai dengan keinginan orang tua mereka masing-masing”(04 Agustus 2021)

Kemudian peneliti menanyakan langsung dengan Ria Susanti selaku

Pendamping PKH mengatakan :

“lingkungan disini sayaa lihat dilapangan setelah adanya program ini sangat bagus ya, karna kan mereka yang tadinya tidak dapat menyekolahkan anaknya dengan adanya program PKH ini mereka bisa menyekolahkan anaknya smapai ke jenjang SMA dan pastinya ekonominya sangat terbantu” (03 Agustus 2021)

Penulis juga menyankan langsung kepada masyarakat penerima PKH Ratna

Lestari mengatakan :

“ Alhamdulillah ekonomi keluarga saya sangat terbantu dengan adanya program PKH ini mba saya juga bersyukur bisa mendapatkan bantuan PKH ini dengan begitu kebutuhan sekolah anak saya dapat terpenuhi” (03 Agustus 2021)

Berdasarkan observasi penulis diketahui bahwa keadaan ekonomi sekitar peserta PKH cukup baik dan dapat teratasi dengan adanya program tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa dan Koordinator PKH mengenai lingkungan politik dalam membangun program PKH :

“kami selaku atasan selalu mendukung dengan adanya program tersebut dan memberi arahan sesuai dengan pemerintah katakan kepada kami bagaaimana cara menjalankan program PKH yang baik agar berjalan dengan lancer” (04 Agustus 2021)

Kemudian penulis mewawancarai Ria Susanti selaku pendamping PKH mengatakan :

“ lingkungan politik disini sangat baik kepala dinas, kepala desa dan koordinator PKH juga sangat mendukung sekali dengan adanya program ini mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah telah memberi kan bantuan kepada masyarakat penerima PKH yang ada di desa atau diseluruh kabupaten

Rokan Hulu ini ya.pastinya program ini sangat membantu sekali.(03 Agustus 2021)

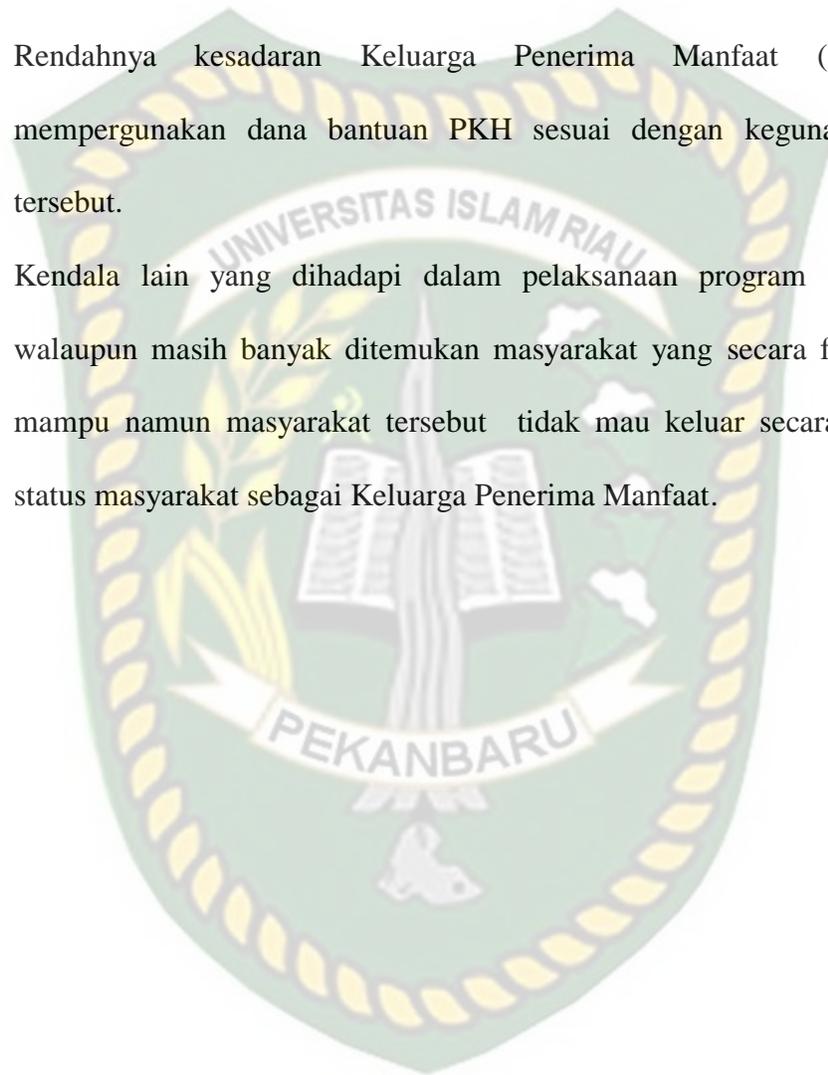
Berdasarkan obeservasi penulis ketahui bahwa lingkungan social,ekonomi dan politik sangat mendukung bagi penerima Program bantuan PKH bagi penerima PKH yang ada di Desa Bukit Intan Makmur.

C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat proses pelaksanaan program PKH didefinisikan sebagai hal atau keadaan yang dapat merintangangi, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan keberlangsungan program PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan program PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

1. Dalam pelaksanaanya terdapat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah terkait dana bantuan PKH, sehingga menjadi tantangan dan kesulitan bagi pihak pendamping PKH untuk memberikan pemaham kepada Keluarga Peerima Manfaat untuk memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan kegunaanya.

2. Rendahnya Sumber Daya Manusia di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mengakibatkan pemberdayaan PKH sulit untuk dilaksanakan.
3. Rendahnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mempergunakan dana bantuan PKH sesuai dengan kegunaan dari dana tersebut.
4. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program PKH adalah walaupun masih banyak ditemukan masyarakat yang secara finansial sudah mampu namun masyarakat tersebut tidak mau keluar secara mandiri dari status masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat.



BAB VI

PENUTUP

Pada sub bab kesimpulan ini akan dibahas mengenai hasil dari analisis yang didapat pada bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai isi dari bab penutup dapat dilihat dari uraian dibawah ini

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan dengan mempertimbangkan indikator analisis yang terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi dan lingkungan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan bagi pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ukuran dan kebijakan program PKH sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan hal dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melakukan graduasi (perubahan status masyarakat dari masyarakat penerima manfaat menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat memenuhi kebutuhanya ekonominya tanpa dana bantuan PKH, sehingga tujuan kebijakan dari Program Keluarga Harapan ini telah tercapai.
2. Dalam pelaksanaanya Program PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan data yang telah

dipaparkan oleh Koordinator PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, program PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu cukup dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan, sehingga program PKH sudah dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

3. Agen pelaksana dalam program PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, telah berperan aktif dalam melaksanakan program PKH, hal ini ditunjukkan dengan aktifnya agen pelaksana dalam pengawasan keberlangsungan program PKH sehingga bantuan ini dapat digunakan sesuai prosedur yang sudah di tetapkan.
4. Sikap para pelaksana PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sangat responsive dan sangat cepat tanggap hal ini di buktikan dengan pelaksana program dalam hal ini pendamping sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan tuntutan kerja dan prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan.
5. Dari hasil pola komunikasi yang dilakukan dengan rapat bersama pihak luar dan koordinasi dengan pihak luar guna menjalankan program PKH telah dimudahkan dengan adanya media massa dan pelaksana program juga agen pelaksana berperan aktif dalam komunikasi guna kelancaran pendistribusian informasi dan bantuan PKH yang di dapatkan oleh masyarakat.

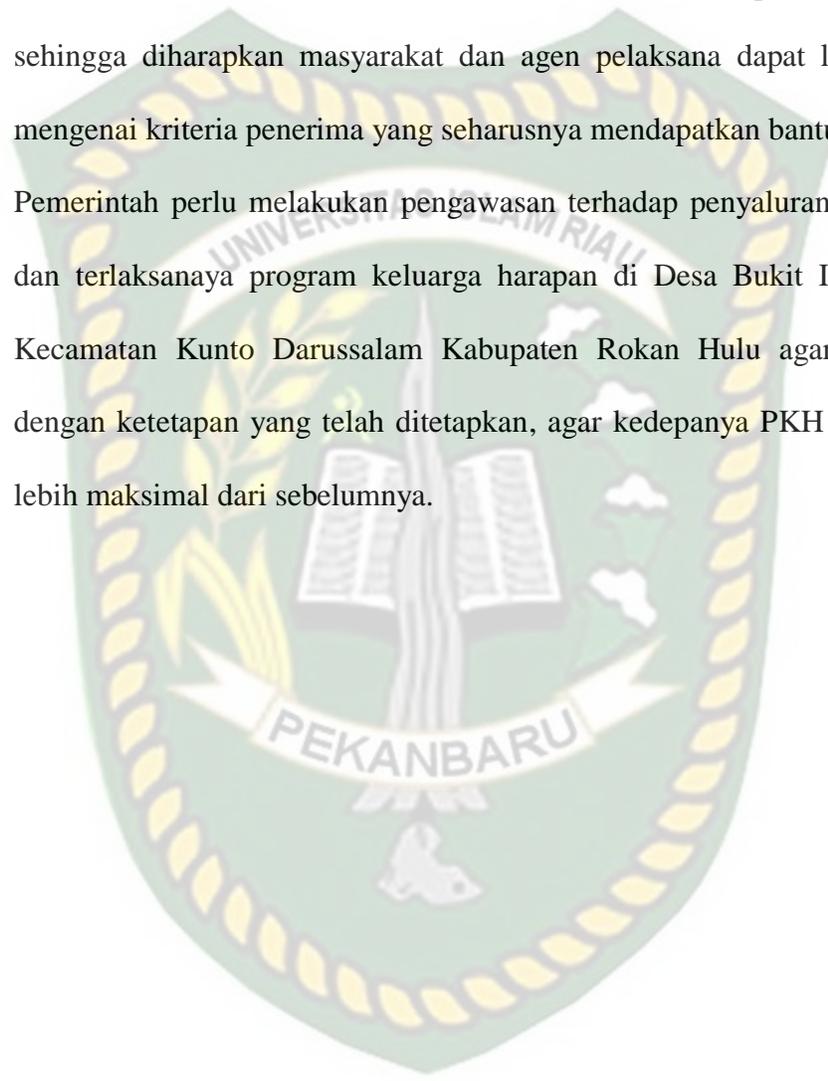
6. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam indikator lingkungan dapat diketahui bahwa masyarakat sangat terbantu oleh adanya program PKH sehingga lingkungan social, ekonomi dan politik di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu memiliki interaksi dan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang baik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan terkait PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu maka penulis dapat memberikan saran untuk mendukung pelaksanaan program keluarga harapan antara lain:

1. Kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mampu secara finansial agar dapat secara mandiri keluar dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH dan lebih layak untuk menerima bantuan tersebut dapat terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
2. Untuk Dinas Sosial dan Dinas yang terkait dengan keterlaksanaanya PKH agar menambahkan jumlah agen pelaksana Program Keluarga Harapan sesuai dengan jumlah desa yang ada di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sehingga agen pelaksana dapat bekerja secara maksimal mendampingi desa yang menjadi focus dari lingkup pekerjaanya.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH dan agen pelaksana berkaitan dengan tata cara pelaksanaan program PKH di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sehingga diharapkan masyarakat dan agen pelaksana dapat lebih memahami mengenai kriteria penerima yang seharusnya mendapatkan bantuan.
4. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan dan terlaksananya program keluarga harapan di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu agar dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, agar kedepannya PKH dapat berjalan lebih maksimal dari sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode penelitian*. Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama
- Djaali, Puji Mulyono, dan Ramly. 2000. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPs UNJ.
- Dunn, Wilian, 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta
- Direktorat Jaminan Sosial, 2012. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*, Kementerian Social RI.
- Handoko, T. Hani. 2002. *Manajemen Pemasaran .Analisa Perilaku Konsumen*. Yogyakarta BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P, 2004, *Manajemen* Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Husaini, Usman. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indiahono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analylis*. Yogyakarta Gava Media.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Labodo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok . Rajawali Press.
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. *Analisis Sosial Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung. Yayasan AKATIGA.
- Manullang, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajah Mada Press.
- Nawawi, Hadari, Martini, M. 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta . Ghalia Indonesia

- _____. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kooperatif*. Yogyakarta . Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nianggolan, Togiartua dkk. 2012. *Program Keluarga Harapan di Indonesia : Dampak ada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta. P3KS Press.
- Nurhasan, 2001. *Tes dan Pengukuran dalam Bidang Pendidikan Jasmani*. Jakarta: Direktorat Jendral Olahraga.
- Ridwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sawitri. S. 2007. *Evaluasi Program Pelatihan Keterampilan Membuat Hiasan Busana dengan Teknik Pemasangan Payet bagi Pemilik dan Karyawan Modiste di Kecamatan Gunung Pai Semarang*. Yogyakarta. PPs UNY.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press ; Jakarta : Distributor, TB Gapura Jasa Murni.
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2014). *Social protection in Indonesia: Challenges and Future*. In Bappenas.
- Siagian, Sondang. P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta. Rineka Cipta
- _____. 2003. *Administrasi Pembangunan. Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Publik*. PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- _____. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soejadi, 1997. *Analisis Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Mandar Maju. Bandung.

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Suryaningrat, Bayu, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bumi Aksara
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offeset YPAI
- Usman, Akbar, 2011. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Wahab, Abdul. 2002. Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi 2007. *Kebijakan Publik : Teori Dan Press*, Yogyakarta. Medan Presido.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- _____ dan Yogias, Moris Adidi. 20014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

B. Skripsi

- Antriya Eka Suwinta, Indah Prabawati. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Maron Kecamatan Kedamngan Kabupaten Blitar*. (Prodi S1 Administrasi Negara .FISH, UNESA)
- Jannah, Roudhatul. 2019. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur. (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Melviona. 2017. *Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu* (Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau).

- Nurhadijah .2021. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hulu)* Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Pratiwi Vivi. 2018. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.* Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Putra Wisnu,Firda .2018. *Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.* (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Yulianti, Nadia .2020. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.* (Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

C. Dokumentasi

- Dinas Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 18 Tahun 2001
- Indonesia, kementria sosial republic, keputusan direktur jaminan sosial keluarga NO 13/3.4/ot.01/01/2021 tentang penepatan keluarga penerima manfaat program keluarga harapantahap 1 termin 1 tahun 2021
- Peraturan undang-undang republic Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
- Peraturan presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan,peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1985 Tentang jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010)
- Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintaha.

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 18 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Desa Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rokan Hulu.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3727 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : YUNI BARIYAH DAROJATUN
NPM : 177310032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DESA BUKIT INTAN MAKMUR KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
Persentase Plagiasi : 27 %
Jumlah Halaman : **103 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Oktober 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safrj, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230